Manguras Tao

Shohibul Anshor Siregar

| Nilai kesakralan lahan (katakanlah wilayah inti mitos Batak Pusuk Buhit) tidaklah bermakna apa-apa bagi dan untuk disubordinasikan oleh kepentingan agregasi kapital | Di lingkungan petani gurem di Indonesia, sertifikat tanah hak milik dapat bermakna sebuah fasilitasi percepatan proses pemindahan hak atas tanah kepada pemodal |

Presiden Joko Widodo memang terberitakan luas berseremoni membagi sertifikat, tetapi justru hulu persoalan adalah kealpaan pemerintah hingga ketimpangan kepemilikan lahan begitu nyata dan kalangan super elit yang hanya sebesar 0,2 % menguasai 74 % lahan di negara yang oleh dunia disebut sebagai negara agraris

Di kedalaman 454,7 meter pemerintah menyerah. Tak mau lagi melanjutkan usaha mencari korban musibah Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di danau Toba, Senin, 18 Juni 2018 itu. Ada yang curiga bahwa keputusan politik diutamakan ketimbang keputusan teknis. Ratna Sarumpaet pun berang dan menantang untuk tak berhenti. Pencarian jangan dihentikan, tuntutan sambil memperbandingkan pengorbanan negara yang dilakukan untuk pencarian korban musibah ini dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pihak lain dalam kejadian musibah berbeda.

Paradoks memang. Sudah berulang kali Presiden Joko Widodo datang ke daerah tujuan wisata (sekitar danau Toba) yang digembar-gemborkan sebagai berkelas internasional itu. Presiden juga menabur janji-janji pada setiap kunjungan, diikuti oleh para pembantunya pada kesempatan-kesempatan lain (Menko Bidang Kemaritiman dan para Menteri lain). Obsesi (meminjam istilah yang diberikan oleh mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli) membangun kawasan tujuan wisata internasional yang akan menjiplak fungsi, bangun kawasan dan tetek-bengek arsitektural Monaco of Asia, terasa seolah kurang menghitung rakyat. Mengapa begitu?

Jika catatan dibuka, ternyata musibah ini cuma sebuah perulangan saja dari tragedi-tragedi dalam pembiaran. Tahun 1997 musibah serupa terjadi. Tahun 2013 terulang kembali, juga tahun 2016. Bahkan beberapa hari setelah musibah KM Sinar Bangun, di danau vulkanik terbesar di dunia itu, terjadi lagi musibah dengan korban yang meski jauh lebih kecil. Semua itu seolah tak menjadi urusan bagi obsesi Monaco of Asia yang seolah sesuatu yang tak berkenaan dengan kehidupan rakyat sekitar. Kepariwisataan kapitalistik yang dibayangkan seakan tak bersentuhan dengan masalah keseharian rakyat.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah paparan berjudul "Program Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Sumatera Utara, Sinergi Pemerintah-Gereja-Komunitas dalam Pengembangan Pariwisata dan Pertanian di Kawasan danau Toba", yang disampaikan pada sebuah forum di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2018, menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo, program pembangunan memberi Sumatera Utara sebuah prioritas. Salah satu di antaranya ialah pengembangan wilayah terpadu yang untuk Sumatera Utara dinamai Western Indonesia Economic Hub and Business Hub for ASEAN. Program ini terdiri dari Sei Mangke Special Economic Zone (Industrial Estate), Kuala Tanjung International Hub Port and Industrial Estate, Kuala Namu International Airport and Aerocity dan Lake Toba MICE and Tourism.

Untuk Lake Toba MICE and Tourism dideskripsikan meliputi MICE, Resort, Geopark dan Leisure & entertainment dengan existing player tunggal yakni Lake Toba Tourism Authority yang beroleh mandat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Rinciannya, sebaran proyek infrastruktur kawasan danau Toba meliputi Bandara Sibisa, Pelabuhan Tiga Ras, Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Simanindo, Pelabuhan Ambarita, Bandara Internasional Silangit dan Jembatan Tano Ponggol. Dalam rencana yang akan menyangkut penduduk yang berjumlah sekitar 2,4 juta jiwa di kawasan Danau Toba itu, diberi perhatian terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan (padi, jagung, buah-buahan seperti durian, perkebunan kopi), peternakan sapi, dan kerbau.

Ada permasalahan klasik seperti jaringan irigasi dan masih banyaknya lahan kosong yang kurang produktif. Semua ini berurusan dengan modal atau pembiayaan, baik dari sektor pariwisata negara (LPEI, PII, KUR), APBN Murni, pinjaman dari institusi keuangan seperti World Bank, China Development Bank, skema KPBU, Badan Otorita (BPODT) dengan kewenangan seperti "Quasy Government".

Dalam paparan lain untuk sebuah seminar berjudul "Tanah Ulayat untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Danau Toba dengan Memperhatikan Kepentingan Nasional" yang diselenggarakan di IT DEL, Laguboti, pada tanggal 28 Juli 2018, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selain mengulangi penjelasan tentang proyek-proyek besar yang salah satunya memberi prioritas kepada Sumatera Utara, juga menjelaskan sepintas tentang dampak ekonomi yang sudah dirasakan daerah terutama sejak tahun 2017 yang lalu. Menurutnya, critical success factors BOPDT 2018 adalah, pertama, penerbangan internasional reguler yakni Singapura dengan Lion Groupnya, Malaysia dengan Malindo dan Airasia, Tiongkok dengan Sichuan Promotion Board (Chengdu), Fantasia Airlines (Guangzhou), dan Hong Kong (Cathay Dragon Air). Kedua, pembangunan di lahan Zona Otoritatif Sibisa SK Penetapan untuk pelepasan Kawasan Hutan, Penerbitan HPL, Penetapan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Ketiga, pendanaan yang terkait dengan penyusunan FS dan Masterplan Lahan Otorita Sibisa (Rp 14M), pembangunan infrastruktur dasar di Lahan Otorita Sibisa, kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pariwisata, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Konsep Lake Toba Nomadic Tourism juga diperkenalkan pada paparan ini dengan karakteristik produk pariwisata berpindah secara berkelompok. Dibayangkan pengunjung mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap hari tanpa harus packing & unpacking. Ini memerlukan branding yang secara atraktif ditujukan pada sasaran yang bergeser ke segmen kelas menengah ke atas. Luhut Binsar Panjaitan optimis bahwa dari segi investasi, produk di Zona Otorita Sibisa dapat juga dipergunakan oleh investor untuk survei potensi investasi sesuai dengan ketertarikannya secara spesifik. Adapun masalah infrastruktur pendukung untuk nomadic tourism dianggap relatif mudah dikembangkan sehingga mungkin diselesaikan tahun ini (2018).

Bagaimana rakyat terlibat dalam proyek modern centris dan capital intensive ini? Akankah partisipasi mereka dihitung sebagai pelengkap atau malah karena hal-hwal nilai dan karakteristiknya (gurem dan berorientasi subsisten-tradisional) kelak diidentifikasi sebagai faktor penghambat? Dialog pembangunan di tanah air selalu berkarakteristik sama sepanjang sejarah.

Dalam kerangka pembangunan kawasan Danau Toba, lahan zona otorita telah ditetapkan seluas ± 386.5 ha yang sebelumnya adalah kawasan hutan lindung yang konon menurut sejarahnya dibuat begitu sembarangan berdasarkan SK MenLHK No.579/2014. Melegakan juga bahwa dalam forum ini terbit rumusan rekomendasi pemanfaatan tanah ulayat (adat) di kawasan danau Toba, yang menghendaki setiap Bupati segera menetapkan Surat Keputusan atau Peraturan Daerah tentang Keberadaan Masyarakat Adat (Kabupaten Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara) dengan limit waktu sampai akhir tahun 2018. Untuk kabupaten lain diharapkan segera memroses (Kabupaten Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, dan Karo).

Ada penegasan untuk meminta masyarakat melengkapi seluruh persyaratan untuk proses penetapan objek tanah yang akan disertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di lingkungan petani gurem di Indonesia, sertifikat tanah hak milik dapat bermakna sebuah fasilitasi percepatan proses pemindahan hak atas tanah kepada pemodal. Mungkin dengan munculnya rangsangan usaha bersifat bankability. Risiko bisnis baru bagi mereka yang bermental agraris tidak begitu menyenangkan berhadapan dengan modernitas berbasis market oriented dan atau financial benefit oriented. Ini menjadi hal yang sangat krusial.

Perihal tanah ulayat (adat) sesungguhnya berbeda kepentingan dengan tanah milik sendiri dalam hal proses sertifikasi. Presiden Joko Widodo selama ini memang giat dalam memberi kemudahan dan terbitkan luas berseremoni dalam membagi sertifikat itu. Tetapi dalam induk masalah pertanahan di Indonesia, justru hulu persoalan adalah kealpaan pemerintah hingga ketimpangan kepemilikan lahan begitu nyata. Kalangan super elit Indonesia yang hanya sebesar 0,2 % menguasai 74 % lahan di negara yang oleh dunia disebut sebagai negara agraris. Itulah prioritas. Berikan itu kepada rakyat. Bangkitkan petani negeri dengan kekuatan kepemilikan lahan agar kemakmuran berbasis keunggulan agraris dapat mengantarkan Indonesia sebagai negara kuat yang menjadi pengontrol politik pangan dunia.

Kekhawatiran lain ialah tentang nilai. Seorang aktivis mantan anggota legislatif daerah (Efendy Naibaho) beberapa bulan lalu aktif menyuarakan kekhawatirannya dengan membuat spanduk dirinya bertuliskan "Jangan Jual Tanah Batak". Orang ini ingin pemberdayaan serius dalam pembangunan yang tentu saja tidak harus mengadopsi rumus satu-satunya para kapitalis tingkat dunia. Ia berandai, bahwa tanah adat itu dianggap investasi rakyat dan bentuk bisnis apa pun yang menggunakannya otomatis menyertakan rakyat sebagai investor dengan atau atas dasar hak ulayat atau adat itu. Musykilkan itu? Tidak sama sekali. Tidak.

Memang, di mata bisnis, nilai kesakralan lahan (katakanlah untuk wilayah inti mitos Batak Pusuk Buhit) tidaklah bermakna apa-apa bagi dan untuk disubordinasikan begitu saja oleh kepentingan agregasi kapital.

Manguras Tao atau ritual pentahiran danau (Toba) adalah upacara tradisional yang dimaksudkan sebagai upaya meluruskan kembali niat dan menunjukkan sikap hormat kepada semesta dan kuasa-kuasa di atasnya. Upacara yang diselenggarakan Selasa 14 Agustus 2018 ini diinisiasi oleh komunitas Ugamo Siraja Batak dan aktivis lingkungan dari Forum Sisingamangaraja yang merasa prihatin atas keadaan terkait perlakuan manusia di lingkungan danau Toba.

Secara eksplisit tak ada keluhan bersifat menuduh kepada siapa pun, karena bahasa mereka adalah bahasa nurani dan kewaspadaan ke depan. Nurani mereka tentu juga berkata, bahwa di

antara lalu lintas modal yang menjadi arus utama dalam prinsip neoliberalisasi, angka-angka agregat pertumbuhan ekonomi (growth) menjadi keniscayaan tunggal. Betapa pun rumus ini sudah sangat usang, dengan obsesi yang tak merujuk nasib rakyat, terbukti selalu mengundang masalah besar, yakni penyingkiran atau setidaknya marginalisasi.

Mereduksi paradoks pembangunan adalah salah satu pesan ritual manguras tao. Mereka pun tak hendak menentang siapa-siapa dengan kekhawatiran mereka atas bayangan kerusakan yang semakin parah (lingkungan) ke depan. Pikiran mereka amat relevan untuk renungan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 73. Horas.

Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Senin, 20 Agustus 2018, hlm B7